

**PENGARUH TINGKAT INFLASI, NILAI TUKAR KURS, DAN JUMLAH
WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN**

**(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
Periode 2013-2017)**

Debi Amelia

Email: ameliadebi@gmail.com

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

ABSTRACT

This research to determine the influence of inflation rate, exchange rate, and total taxpayers towards income corporate tax receipts on Tax Service Office Pratama Medan Polonia. The type of data used are secondary data. This research uses monthly data from 2013 to 2017 with sample of 60 time series data. Sources of the data used in this research is secondary data derived from documentation of KPP Pratama Medan Polonia. Badan Pusat Statistika Kota Medan, and the official website of Bank Indonesia. The result of this research showed that inflation rate and exchange rate does not has influence to income corporate tax receipts, but total tax payers has significant influence to income corporate tax receipts.

Keywords : Inflation Rate, Exchange Rate, Total Taxpayers, and Income Corporate Tax Receipts

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sebuah fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di setiap negara di belahan dunia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali negara yang kaya akan sumber daya alam yang

dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008).

Penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun khususnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (dalam Miliar)
2013	21.002.888.054
2014	29.299.520.667
2015	65.259.620.744
2016	39.145.466.748
2017	61.067.458.710

Sumber : *Laporan Tahunan KPP Pratama Medan Polonia 2012-2017*

Terdapat variabel ekonomi makro yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan, yaitu nilai tukar kurs. Secara umum, nilai tukar kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain.

Kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2014 berdampak pada kenaikan harga-harga beberapa kebutuhan pokok, yang mana hal tersebut juga membuat daya beli masyarakat melemah. Akibatnya nilai uang yang dimiliki

negara menurun. Turunnya nilai uang akan menurunkan hasil investasi, sehingga akan mempengaruhi pajak yang akan dibayar.

Apabila kondisi ekonomi suatu negara mengalami perubahan, maka hal tersebut diikuti dengan perubahan nilai tukar secara substansional. Nilai tukar kurs mengakibatkan sebuah perusahaan maupun instansi lain harus menerima konsekuensi dari perubahan nilai kurs yang sangat fluktuatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keynes

"Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dengan memfokuskan bagaimana perbuatan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan (I) lebih besar dari jumlah barang yang tersedia (S)" (Putong, 2015).

Teori Pertumbuhan Neo Klasik Solow

Pertumbuhan ekonomi Neo Klasik diungkapkan oleh Solow tahun 1970, yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang dijadikan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi adalah adanya unsur pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005).

Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak Penghasilan

Resmi (2008) berpendapat bahwa "Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak".

Nilai Tukar Kurs

Definisi kurs (*exchange rate*) dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat sekarang atau di masa depan antara dua mata uag negara yang berbeda.

Inflasi

Secara umum, pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang yang diakibatkan karena terjadi ketidakseimbangan arus uang dan barang (Maxmanroe, 2018).

PENURUNAN HIPOTESIS

1. Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Seperti yang ditulis dalam hukum demand (permintaan) yang mengatakan bahwa "Permintaan akan bertambah apabila harga turun dan akan berkurang apabila harga naik". Maka tingkat konsumsi masyarakat akan melonjak jika harga barang dan harga jasa turun, begitu juga sebaliknya.

Dengan meningkatnya konsumsi di masyarakat maka akan menaikkan pendapatan negara ataupun pendapatan daerah. Pajak penghasilan merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara yang paling besar. Otomatis ketika inflasi di suatu negara tidak melonjak maka pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak penghasilan akan tetap stabil juga.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas peneliti menyusun dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

H1 : tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

2. Nilai Tukar Kurs terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Nilai tukar kurs merupakan harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Perubahan nilai tukar mata uang berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uang. Apresiasi merupakan kenaikan nilai tukar negara terhadap nilai mata uang negara lain. Sedangkan depresiasi mata uang pengertiannya adalah dimana terjadinya penurunan nilai

tukar mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang negara lain (Berlianta, 2005).

Safassi (2011) menyatakan bahwa Kurs mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Menurutnya, kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan disebabkan karena nilai rupiah yang turun akibat dari naiknya permintaan masyarakat terhadap dolar sementara penawaran terhadap dolar menurun.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas peneliti menyusun dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

H2 : Nilai tukar kurs berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

3. Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Besarnya jumlah pajak terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas negara, sehingga hal tersebut akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Fitriani (2013) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh jumlah wajib pajak yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan karena Wajib Pajak merupakan elemen yang paling penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap ada penambahan jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak masyarakat yang sadar akan kewajibannya dan otomatis akan membayar pajaknya.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas peneliti menyusun dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

H3 : Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar kurs, dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, maka jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dan Badan Pusat Statistika Kota Medan.

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series*. Data sekunder diperoleh dari institusi yang terkait akan hal-hal yang diteliti oleh

peneliti. Data sekunder yang dimaksud adalah tingkat inflasi yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistika Kota Medan (www.medankota.bps.go.id) dan data nilai tukar kurs diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), sedangkan data jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan badan diperoleh dari data dokumentasi KPP Pratama Medan Polonia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan untuk menghimpun data yang ada. Pengumpulan data tersebut ditujukan untuk menyusun data-data yang ada sehingga diketahui hubungan antara data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan datanya diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia, web resmi www.medankota.bps.go.id, dan www.bi.go.id.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah data tingkat inflasi, nilai tukar kurs, jumlah wajib pajak, dan penerimaan pajak penghasilan badan dalam kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2017 sebanyak 60 bulan yang berarti jumlah sampel sebanyak 60 buah data namun karena data yang diperoleh terdeteksi *outlier* sehingga data yang diperoleh adalah 53 buah data. Sampel yang digunakan merupakan sampel jenuh.

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang berhubungan dengan judul dan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

Penerimaan pajak penghasilan badan (Y) adalah penerimaan dari pajak yang didasarkan pada penghasilan bersih dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pajak penghasilan tahun 2008 (Resmi, 2008).

b. Variabel Independen

1. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah nilai kondisi dimana uang yang beredar sudah melebihi ambang normal (Manullang, 1993). Penelitian ini menggunakan perubahan angka inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika Kota Medan pada periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2017.

2. Nilai Tukar Kurs

Nilai tukar USD atau disebut juga kurs USD adalah perbandingan nilai atau harga mata uang USD dengan mata uang rupiah. Data kurs bersumber dari laporan Bank Indonesia dan data ini dinyatakan dalam rupiah dari periode Januari 2013 sampai Desember 2017.

3. Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2014) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemotong, penyeter, dan penghitung pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel wajib pajak dapat dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi atau

badan yang terdaftar, dan didapatkan dari laporan penerimaan pajak pada bagian PDI di setiap KPP.

TEKNIK ANALISIS DATA

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dan penyajian data yang disertai dengan perhitungan agar dapat menjelaskan keberadaan karakteristik data yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan pengukuran mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini antara lain uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk memastikan persamaan regresi yang disusun memiliki ketepatan dalam estimasi, konsisten serta tidak bias maka perlu melakukan uji kualitas data.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah dipaparkan oleh peneliti. Hipotesis yang dipaparkan perlu diuji kebenarannya maka dari itu pengujian hipotesis dilakukan secara statistik melalui beberapa tahap, yaitu regresi linear berganda, uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan uji koefisien determinasi ($Adj R^2$).

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Pengujian dari aplikasi SPSS disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan PPh Badan	53	11569825	23,491716667 4400	3403611670	3755545062
Tk. Inflasi (TI)	53	-1,36	2,74	,5042	,76939
Nilai Tukar Kurs (NTK)	53	10186,65	14896,1	12981,27	1270,13975
Jumlah WP	53	10357	14671	12647,52	1193,975
Valid N (listwise)	53				

Sumber: Data diolah (2019)

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^(a,b)	Mean	-,0264326
	Std. Deviation	,54639635
Most Extreme	Absolute	,139
Differences	Positive	,139
	Negative	-,087
Kolmogorov-SmiRnov Z		1.012
Asymp. Sig. (2-tailed)		,257

Sumber: Data diolah (2019)

Dalam uji normalitas diatas, tampak hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,257 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolienaritas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TI	,974	1,027
	NTK	,215	4,647
	Jlh WP	,217	4,599

Sumber: Data diolah (2019)

Data tabel terbukti bahwa $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$, maka data pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.
1	(Constant)	,443
	TI	,341
	NTK	,537
	Jlh WP	,323

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Sig. untuk masing-masing variabel independen Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Kurs, dan Jumlah Wajib Pajak > 0,05, maka dapat di simpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate	Durbin-Watson
1	,820 ^(a)	,672	,652	,46277	1,753

Sumber: Data diolah (2019)

Hasil dari Durbin Watson (DW) menunjukkan angka 1,753 lebih besar dari batas atas (dU) sebesar 1,6785 dan pengurangan dari (4-dU) sebesar 2,3215, maka diperoleh persamaan $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,6785 < 1,753 < 2,3215$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		-2,772	,008
TI	-,102	-,941	,351
NTK	,019	,082	,935
Jlh WP	,629	2,749	,008

Sumber: Data diolah (2019)

Arah pada penelitian ini dilihat dari tabel Beta dikarenakan dilakukan Logaritma Natural (Ln) pada data. Berdasarkan dari hasil tabel di atas maka persamaan regresi dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

$$\text{LN PPh Badan} = (-0,102)\text{Inflasi} + 0,019\text{Kurs} + 0,629\text{Wajib Pajak} + e$$

Penjelasan:

- 1) Koefisien regresi untuk tingkat inflasi sebesar $-0,102$, artinya setiap kenaikan/bertambahnya satu satuan pada variabel tingkat inflasi akan menyebabkan perubahan/berkurangnya penerimaan pajak penghasilan badan sebesar $-0,102$ poin.
- 2) Koefisien regresi nilai tukar kurs sebesar $0,019$ artinya setiap kenaikan/betambahnya satu satuan pada variabel nilai tukar kurs akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak penghasilan badan sebesar $0,019$ poin.
- 3) Koefisien regresi jumlah wajib pajak sebesar $0,629$, artinya setiap kenaikan/bertambahnya satu satuan pada variabel jumlah wajib pajak akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak penghasilan badan sebesar $0,629$ poin.

Uji Hipotesis

1. Uji F

Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum Of Squares		Mean Square	F	Sig.
Regression	9,301		3,100	12,986	,000 ^(a)
Residual	11,698		,239		
Total	20,999				

Sumber: Data diolah (2019)

Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 0,005 ($0,000 < 0,005$). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji t

Tabel 8. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
	Std. Error	
(Constant)	6,769	,008
TI	,089	,351
NTK	1,431	,935
Jlh WP	1,509	,008

Sumber: Data diolah (2019)

- a. Tingkat inflasi memiliki nilai Sig. 0,351 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ($0,351 > 0,05$). H1 ditolak yang menyatakan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
- b. Nilai Tukar Kurs memiliki nilai Sig. 0,935 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ($0,935 > 0,05$). H2 ditolak yang menyatakan nilai tukar kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
- c. Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai Sig. 0,008 di mana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 ($0,008 < 0,05$). H3 diterima dan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

3. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	,666(a)	,443	,409	,48861

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS diperoleh *adjusted* $R^2 = 0,409$ (40,9%). Artinya kemampuan variabel independen (Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Kurs, dan Jumlah Wajib Pajak) dalam menjelaskan variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan) adalah 40,9% sedangkan sisanya sebesar 59,1% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi memiliki nilai Sig. $0,351 > 0,05$ yang berarti tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan koefisien variabel sebesar $-0,102$ satuan menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan penerimaan pajak penghasilan badan memiliki arah hubungan yang negatif.

Masalah yang muncul pada penerimaan pajak yaitu belum mencapai target yang sudah ditetapkan karena tingkat inflasi yang rendah belum selaras dengan penerimaan pajak Kota Medan Polonia. Karakter kebijakan fiskal Indonesia cenderung ke siklikal bahkan prosiklikal. Bank Indonesia (2009)

menyatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat siklikal secara agregat atau justru prosiklikal jika dilihat dari pengelompokan pengeluaran. Sifat siklikal tersebut berpotensi memberikan tekanan instabilitas dalam perekonomian, seperti kenaikan inflasi (Surjaningsih dkk, 2012).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratama dkk (2016), Kristanti dkk (2017), dan Nasution (2013) yang menyebutkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Pengaruh Nilai Tukar Kurs

Nilai tukar kurs memiliki nilai Sig. $0,935 > 0,05$ yang berarti nilai tukar kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan koefisien variabel sebesar 0,019 satuan menunjukkan bahwa nilai tukar kurs dan penerimaan pajak penghasilan badan memiliki arah hubungan positif.

Pelemahan nilai tukar rupiah lebih disebabkan oleh kebijakan-kebijakan dari pihak luar negeri dan kebijakan pemerintah yang bisa dikatakan belum cukup efektif dan sikap yang kurang tegas dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam operasional perusahaan atau badan, kebutuhan akan pemakaian mata uang asing tidak begitu diperlukan karena biasanya yang dilakukan dalam setiap aktivitas perusahaan menggunakan mata uang rupiah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Eliyah (2005), Mispianiti dan Kristanti (2017), dan Danu Brata (2007) yang menyatakan bahwa nilai tukar kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai Sig. 0,008 < 0,05 yang berarti jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan koefisien variabel sebesar 0,629 satuan menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan badan memiliki arah hubungan positif.

Berpengaruhnya jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan karena wajib pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan dan wajib pajak merupakan elemen yang paling penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Meningkatnya jumlah wajib pajak tentu akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak penghasilan badan.

. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratama dkk (2016), Anti (2014), Hariyanto dkk (2014), dan Tresno (2012) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa variabel nilai tukar kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, peneliti menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi pemerintah sebaiknya menambah strategi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak karena wajib pajak sangatlah berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, seperti melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang kesadaran masyarakatnya tentang kewajiban membayar pajak masih kurang.
2. Bagi pemerintah, selain dari sisi wajib pajak dapat dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pegawai Kantor Pajak tentang tata cara pelayanan yang baik agar kualitas pelayanan semakin baik dan berdampak pada kesadaran Wajib Pajak yang dapat meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah variabel yang dipergunakan, masih banyak variabel lain dari sektor pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan seperti SPT Masa/Tahunan dan Setoran Pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode waktu lebih dari 5 tahun dan menambah objek penelitian tidak hanya di satu KPP Pratama

sehingga dapat mengetahui dan menganalisis kondisi lain di luar tahun penelitian ini, sekaligus menambah faktor-faktor lain di luar penelitian ini seperti variabel ekonomi makro lainnya yaitu suku bunga, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlianta, H. C. (2005). *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Manullang. (1993). *Ekonomi Moneter*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maxmanroe. (2018). *Pengertian Inflasi: Penyebab, Jenis, Dampak, dan Teori Inflasi*. Retrieved November 17, 2018, from www.maxmanroe.com: <http://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-inflasi.html>
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. PT Elex Media Komputindo.
- Putong, I. (2015). *Ekonomi Makro*. In *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (p. 210). Jakarta: Buku&Karya karya Iskandar Putong.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional*. In *Teori dan Aplikasi* (p. 204). Jakarta: Bumi Aksara.